

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG  
PEMBATALAN PASAL 122 HURUF L  
UNDANG-UNDANG MD3**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**RIA DWI AFRIDA**

**NPM: 1521020243**

**Jurusan: Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440H/2019M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG  
PEMBATALAN PASAL 122 HURUF L  
UNDANG-UNDANG MD3**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**RIA DWI AFRIDA**

**NPM : 1521020243**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440H/2019M**

## ABSTRAK

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat diciptakan sebagai representatif masyarakat, untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas akan sebuah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan demokrasi Indonesia. DPR berwenang membuat Undang-Undang bersama dengan presiden, tujuannya adalah agar seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut. Pada tanggal 12 Februari 2018 DPR mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam rapat paripurna DPR. Akan tetapi tidak lama dari pengesahan Undang-Undang tersebut banyak ditentang oleh para ahli hukum terutama dikalangan masyarakat dikarenakan bunyi Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang tersebut dapat membatasi hak kebebasan mengeluarkan pendapat, sehingga Undang-Undang MD3 tersebut di laporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materikan (*judicial review*) karena Pasal Pasal 122 huruf 1 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan demokrasi Indonesia maka Mahkamah Konstitusi dapat berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan putusannya bersifat final. Dalam Putusan MK sendiri mengeluarkan putusan yang memutuskan membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018? Serta Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 Atas Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 Atas Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai merendahkan kehormataan DPR, mengkaji hak-hak asasi manusia dalam sistem permerintahan Indonesia serta menggambarkan bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 atas merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkann hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dirasa Hakim telah sesuai dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan, karena dengan pembatalan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahunn 2018 tersebut telah mengembalikan lagi hak-hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Fiqh Siyasah Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah sesuai dengan ruang lingkup fiqh siyasah dimana ruang lingkup fiqh siyasah

yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan dibahas dalam siyasah *dusturiyah* yang menjamin hak konstitusi warga negara yaitu dengan mengembalikan hak untuk mengelurakan pendapat dan mengkritik DPR, sehingga rakyat tidak takut akan bayang-bayang sebuah hukuman.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

---

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Dwi Afrida  
NPM : 1521020243  
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian suratt pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juli 2019  
Penulis

Ria Dwi Afrida  
1521020243





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-  
XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122  
Huruf L Undang-Undang MD3.  
Nama Mahasiswa : Ria Dwi Afrida  
NPM : 1521020243  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosayah dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**NIP. 195707051989031001**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF L UNDANG-UNDANG MD3.** Disusun oleh: Ria Dwi Afrida, NPM. 1521020243, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis, 03 Oktober 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Sekretaris : Abu Zar al-Ghifari, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.sos., M.H.

Penguji Pendamping I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Penguji Pendamping II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui  
Dean Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Fairuddin, M.H.**  
NIP. 196210219930310002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>1</sup>*

(Q.S An-Nisaa 58)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 87



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah tercinta, Cipto Basuki, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih ayahku yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan putrimu yang kamu sayangi.
2. Ibu tersayang, Nurhasni, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejuung kuku pun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
3. Kakak dan Adikku tercinta, Eric Pratama Yudha, Wisnu Anas Saputra, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepadamu.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.

6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



## **RIWAYAT HIDUP**

**Ria Dwi Afrida**, lahir pada tanggal 18 April 1997 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Cipto Basuki dan Ibu Nurhasni. Beralamat di Desa Fajar Bulan, Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Fajar Bulan pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Waytenong pada tahun 2009. Selama duduk di bangku SMP penulis menjadi anggota pramuka.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMKN 1 Waytenong 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif di bidang ekstrakurikuler paskibra.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 25 Juli 2019

Ria Dwi Afrida  
1521020243



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU/XVI/2018 TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasa Angkatan 2015, khusus Siyasa E: Tiara Virginia, Rizki Amelia, Anggraini, Fitriani, Rima Sinfalina, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa, Nadiyah, Ice, Mayang, Habib, Ovi, Jodi, Andre, Billi, Yedi, Khomsi Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari, Fauzi yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Teman seperjuangan dari SMK sampai kuliah Siti Maulidatus Sa'adah yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 25 juli 2019

Ria Dwi Afrida  
1521020243



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul ..	1
B. Alasan Memilih Judul ..	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian ..	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Signifikasi Penelitian .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	19
1. Konsep fiqh siyasah tentang hak asasi manusia.....	19
2. Kedudukan dpr dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.....	29
B. Tinjauan Pustaka.....	43
<b>BAB III KASUS POSISI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi.....	48

B. Proses <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Konstitusi Tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat .....	54
C. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi .....	58
D. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XVI/2018	
1. Pokok-Pokok Permasalahan.....	68
2. Dasar Pertimbangan.....	70
3. Pendapat Mahkamah.....	70
4. Putusan Mahkamah .....	72

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat .....	74
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUUXVI/2018 Tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** yang berlandaskan teori dan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Tinjauan** menurut kamus bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

**Fiqh Siyasah** merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

**Putusan** menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan dia dibebaskan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 560.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.



**Mahkamah Kostitusi** adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>4</sup>

**DPR** merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3*” tersebut adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengenai Pasal 122 huruf l tentang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sebagaimana Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dalam memutuskan perkara Pasal 122 huruf l Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 dengan berpijak pada pandangan fiqh siyasah.

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1124.

<sup>4</sup> Khairuddin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2012), h. 40.

<sup>5</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Trasnformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 75.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis yang mendorong dipilihnya judul proposal skripsi ini adalah:

### 1. Alasan Objektif

- a. Menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018 Terhadap Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai merendahkan kehormatan dewan perwakilan rakyat maupun anggotanya sehingga dalam Pasal tersebut dapat merugikan dan membatasi hak-hak warga negara khususnya pada hak kebebasan mengemukakan pendapat, tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- b. Mendalami dan memperluas wawasan terkait masalah putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai merendahkan kehormatan dewan perwakilan rakyat yang menjadi perdebatan dikalangan praktisi hukum, pejabat pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas ini dalam Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dan permasalahan ini

sangat memungkinkan untuk dibahas karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Negara hukum tak terpisahkan dengan konsep demokrasi dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusional, kehadiran konstitusi merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan menjelaskan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu didalamnya ditemukan letak rasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contact* antara yang di perintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah).<sup>6</sup> Dalam konsep negara hukum pada dasarnya ditunjukan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.

Dalam demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat dijamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini

---

<sup>6</sup> Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet 2, h. 32-33.



bertentangan dengan prinsip demokrasi.<sup>7</sup> Kedaulatan rakyat sebagai ciri suatu pemerintahan yang demokratis itu dapat dilihat bagaimana jika pemerintahan itu membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan publik, jika kebijakan itu dibuat tidak melibatkan dan mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi semua rakyat, tetapi dibuat oleh elite yang mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan segelintir orang atau sekelompok rakyat maka kebijakan yang diambil itu tidak bisa disebut demokratis. Prinsip dasar kedua dari pemerintahan yang demokratis ialah adanya kesetaraan atau kesamaan politik, kesetaraan politik memerlukan bahwa setiap warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik.<sup>8</sup> Dengan demikian kesetaraan politik dalam demokrasi diberikan agar masyarakat dapat memberikan kritikan, masukan serta pendapat sehingga mengurangi timbulnya perbedaan pendapat dalam pemerintah membuat suatu kebijakan maupun perundang-undangan, agar tercapai pemerintahan yang demokratis.

Sistem politik demokratis pulalah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang

---

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 62.

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan dianggap lebih baik jika diatur dalam sebuah konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dapat diperkecil.<sup>9</sup>

Dalam konteks jaminan atas HAM konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. HAM dalam perspektif Islam terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM salah satunya bahwa universalitas HAM sebagai Khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam didalamnya.<sup>10</sup> Politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harus bersifat promotif, protektif, dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyelenggaraan HAM.<sup>11</sup> Sehingga negara hukum demokrasi harus dijalankan dan diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara).

---

<sup>9</sup> Philipus, Ng dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 118.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>11</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia* ..... , h. 111.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang didalamnya terdapat hak-hak warga negara Indonesia salah satunya hak mengemukakan pendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak individu untuk menyampaikan gagasan dan pikiran tanpa mengekor pada orang lain. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya dengan cara yang dikehendakinya,<sup>12</sup> asas utama kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah bahwa setiap pendapat harus berpijak pada prinsip amar makruf nahi munkar. Doktrin ketatanegaraan Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeluarkan pendapat yang benar dan beralasan, bahkan salah satu karakteristik orang-orang beriman adalah mereka yang berani mengeluarkan pendapat yang benar sekalipun berat.

Kebebasan berpendapat mencakup beberapa kebebasan yaitu, (1) kebebasan memberikan nasihat, (2) kebebasan melakukan pengawasan, (3) kebebasan memberikan kritikan. Salah satu pegangan prinsip kebebasan berpendapaat dalam sistem ketatanegaraan adalah sebuah pernyataan Nabi Muhammad SAW:

*“Hendaklah kalian tidak menjadi orang yang tidak berpendirian, yaitu orang yang suka berkata, jika orang lain berbuat baik, aku pun akan baik. Jika orang lain berbuat buruk, aku pun akan berbuat buruk.” Hendaklah kalian teguh pendirian. Jika orang lain berbuat baik, berbuat baiklah kalian. Jika orang lain berbuat buruk, jauhlah kalian dari keburukan.*

---

<sup>12</sup> Ija Sutana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h.

Sebenarnya mengeluarkan pendapat atau kritikan yang benar bukan sekedar hak melainkan kewajiban, apabila masyarakat bersikap apatis terhadap kebobrokan, korupsi, ketidakadilan, dan penyelewengan lainnya baik dilakukan oleh pemerintah maupun individu, maka masyarakat terjebak dalam kubangan dosa.<sup>13</sup> Dalam membuat peraturan perundang-undangan harus berprinsip pada Pancasila terutama sila kedua dan kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam negara hukum. Sehingga konstitusi peraturan perauran dasar yang menbingkai batas-batas kekuasaan pemerintah dan memuat keharusan perlindungan HAM oleh negara. Lembaga legislatif adalah parlemen yang merupakan pembuat Undang-Undang sesuai dengan kehendak rakyat, didalam negara demokrasi rakyatlah yang menentukan hukum melalui wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri.<sup>14</sup> Maka dari itu DPR dalam membuat Undang-Undang harus berdasarkan keluhan rakyat bukan untuk kepentingan lembaga, organisasi ataupun anggota-anggota yang terdapat didalamnya apabila adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan adanya penyimpangan politik dan hukum maka hal tersebut terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 217.

Dalam Fiqh Siyasah konstitusi juga disebut dengan *dusturi* atau *siyasah dusturiyah* yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, dalam kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al- tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>15</sup>

Secara hukum negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Karena negara merupakan negara yang memiliki kekuasaan, dalam kaitanya sengan HAM negara dituntut tidak menyalahgunakan kekuasaanya (*abuse of power*) pengertian negara disini bukan hanya pemerintahan esekutif tetapi juga legislatif.<sup>16</sup> Secara filosofis HAM dimaksudkan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenag-wenangan pihak penguasa, sehingga hakikat HAM dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Keterbukan pemerintahan itu tidak hanya meliputi pemberian informasi kepada masyarakat secara umum saja, namun harus berkaitan dengan keterbukaan dalam hal prosedur pengambilan keputusan pemerintah baik yang menyangkut suatu rencana pemerintahan seperti kebijakan serta pembentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ....., .h. 187.

<sup>16</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 59.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 29.



maupun dalam penerbitan keputusan atau ketetapan yang membawa beban kewajiban bagi warga masyarakat.

Maka dari itu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang sebagai wakil rakyat dalam menyuarkan aspirasi mereka akan ketidakadilan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam membuat Undang-Undang haruslah berdasarkan nilai-nilai pancasila dan berdasarkan keluhan masyarakat, serta dalam membuat peraturan perundang-undangan lembaga DPR tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dengan membuat undang-undang yang dapat membatasi hak-hak masyarakat, salah satunya hak kebebasan mengemukakan pendapat bagi masyarakat yang kritis akan jalannya suatu pemerintahan, seperti di tetapkannya Undang-Undang MD3 terutama tentang DPR yang terdapat didalam Pasal 122 huruf 1 yang adanya pembatasan masyarakat untuk mengkritik, yang berbunyi “apabila merendahkan kehormatan DPR dapat di tindak pidana sesuai dengan UU tersebut.” Hal ini tentunya tidak sesuai dengan adanya Hak Asasi Manusia dalam negara hukum yang berlandaskan asas demokrasi. DPR telah melakukan pelanggaran HAM dengan membuat Undang- Undang tersebut. Dalam prinsip demokrasi terdapat tujuh prinsip salah satunya kebebasan berbicara yaitu setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, h. 221.

Mahkamah Kostitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi, selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelesaian beberpa masalah yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawal, mengontrol dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Adanya Mahkamah Konstitusi juga memberikan harapan baru bagi pencari keadilan ditengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan maupun pemerintahan.<sup>19</sup>

Dengan dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang Putusan mengenai Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat menjamin kembali hak-hak warga negara dalam mengemukakan pendapat dan mengkritik kinerja pemerintahan tanpa adanya rasa takut atau tekanan dari peraturan perundang-undangan yang pernah dibuat oleh lembaga DPR yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia.

---

<sup>19</sup>Khairuddin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 7

#### **D. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai objek material yang dikaji. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018, yang terdapat pada Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 Atas Merendahkan Kehormatan DPR dan anggota DPR menurut Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adanya penyimpangan hukum dan politik.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka signifikansi atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Signifikansi secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat:
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.
  - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahnya maupun dalam upaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3.

## 2. Signifikansi secara praktis yaitu:

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
- b. Sebagai masukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Peraturan Undang-Undang harus mempertimbangkan kebijakan dan keadilan agar terciptanya negara yang demokratis.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka yang diperlukan agar mampu mengadakan penelitian mendapat data yang *valid* dan *otentik*. Beranjak dari hal diatas maka penulis perlu menentukan metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Maka penulis menggunakan metode- metode dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa



buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis membaca buku yang berkaitan dengan hak-hak kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat yang dibatasi oleh Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang dibuat oleh DPR dalam menyalangunakan kekuasaan dan adanya pelanggaran HAM dan dalam padangan fiqh siyasah, dan membaca buku mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018 yang telah memutus Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Serta menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai adanya pembatasan hak-hak masyarakat dalam kebebasan mengemukakan pendapat yang dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang terdapat dalam Pasal 122 huruf l dan menggambarkan mengenai

---

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, h. 10.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU/XVI/2018 tentang Pasal dalam Undang-Undang tersebut yang telah diputus.

## 2. Data dan Sumber Data

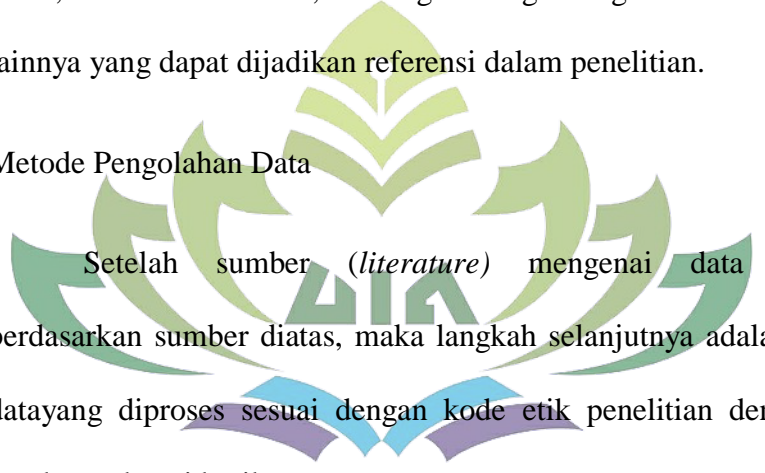
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan diambil dari bahan hukum primer. Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, Al-Qur'an, dan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018,
- b. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, kitab-kitab Fiqh Siyasah, buku-buku tata negara, buku-buku HAM, buku Fiqh siyasah dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari buku- buku fiqh siyasah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPRD, undang-undang mengenai HAM, dan tulisan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

### 4. Metode Pengolahan Data



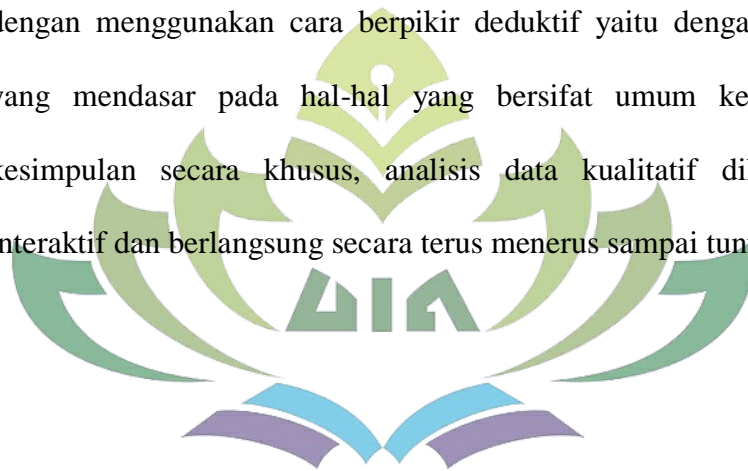
Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari al-Qur'an dan buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 5. Analisa Masalah

Setelah bahan-bahan yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Hak Asasi Manusia**

###### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia sebenarnya muncul beberapa abad sebelum Masehi, Para filosof Yunani kuno juga telah mengemukakan gagasan-gagasan tentang Hak Asasi Manusia. Plato dalam salah satu nasehatnya menyatakan bahwa kesejahteraan bersama baru akan tercapai apabila setiap warga melaksanakan hak dan kewajibanya masing-masing. Aristoteles juga telah mengemukakan pemikiran bahwa negara yang baik adalah negara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat umum. Kemudian ide-ide hak asasi manusia terus mengalami perkembangan hingga sampai pada zaman modern. Di dalam kerangka pemikiran barat modern, ide tentang hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18 masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, manusia pada zaman tersebut terdiri dari dua lapisan besar, yakni lapisan atas dan lapisan bawah, lapisan bawah tidak mempunyai hak-hak dan diperlakukan secara sewenag-wenang oleh pihak



yang berkuasa atas diri mereka, karena mereka dipandang sebagai budak yang dapat dilakukan sewenag-wenang oleh sang pemiliknya.<sup>22</sup>

Semenjak masa awal Islam pada abad ke-7 ajaran Islam sudah menunjukkan keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi sosial, moral dan spiritual. Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan dari Tuhan semesta alam (*rabb al-alamin*) dan Tuhan segenap manusia (*rabb al-nafs*). al-Qur'an merupakan inti ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan kepadanya dan aspek kemanusiaan merupakan ajaran inti dari wahyu tersebut. Dalam memerintah kota Madinah, Nabi Muhammad membangun nilai dasar keberadaan antar suku yang saling berbeda yang dikenal sebagai piagam Madinah merupakan kesepakatan bersama antara kelompok suku, Kaum muslim arab, Yahudi, dan kelompok non-Muslim lainnya (Seperti kelompok Nasrani dan kemungkinan juga termasuk kalangan penganut agama pra-Islam) mengikat semua kelompok tersebut mengamati hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu selama mereka hidup dibawah wilayah kekuasaan Nabi Muhammad SAW.<sup>23</sup>

Piagam Madinah adalah hasil kesepakatan berbagai unsur dari warga kota Madinah, yakni kaum Muslimin (Muhajirin dan angsar yang terdiri dari nernagai suku), kaum yahudi (juga terdiri dari berbagai suku) dan penduduk non muslim Madinah lainnya. Piagam ini disusun dan

---

<sup>22</sup> Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indosia dalam prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan litbang & Departemen Agama RI, 2007) 26.

<sup>23</sup> Ebrahim Moosa, *Islam Progresif*, (Jakarta: Iternastional Center for Islam and Pluralism, 2004), h. 8.

disepakati pada tahun 1 Hijriah (622 Masehi) dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau dan kaum Muhajirin hijrah dari mekkah ke madinah, piagam madinah dapat dipandang sebagai konstitusi negara karena memuat peraturan tentang hal-hal pokok yang diperlukan dalam suatu negara, seperti Masalah penduduk atau warga Negara, wilayah, pemerintah, hukum, hak dan kewajiban warga Negara dan sebagainya. Piagam madinah terdiri dari 47 Pasal yang mengatur antara lain intra dan antar unsur warga madinah, hak dan kewajiban warga negara, hak dan kedudukan minoritas pembelaan negara, kepemimpinan hukum, dan sebagainya. Dari keseluruhan ketentuan di dalam piagam madinah terdapat aturan-aturan yang menyangkut hak asasi manusia, antara lain:

1. Kebebasan dan kemerdekaan (Pasal 1).
2. Perlindungan jiwa dan masalah uang tebusan/diyat (Pasal 2-10 dan 14).
3. Perlindungan dari hukuman sewenang-wenang (Pasal 36).
4. Hak dan kewajiban kaum minoritas (Pasal 16, 24-35).
5. Jaminan perlindungan pada kaum lemah (Pasal 15).
6. Hak mendapatkan perlindungan negara dan melakukan bela negara (Pasal 16-24, 37-38, dan 44).
7. Hak kebebasan beragama (Pasal 25-35).
8. Hak berusaha dan hak milik (Pasal 47).<sup>24</sup>

Di dunia Islam, ide, gagasan, dan implementasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bersumber dari ajaran Islam dan mulai berkembang sejak syari'at Islam diturunkanya pada awal kabad ke-7 Masehi. Syariat Islam, dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utamanya, secara kongkrit mengandung berbagai rumusan tentang hak asasi manusia, meskipun harus pula diakui bahwa sebagianya masih

---

<sup>24</sup> Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indosia dalam prespektif Hukum Islam*....., h. 80.

berbentuk nilai dan aturan yang perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi aturan yang lebih sempurna, aplikatif dan positif. Hal ini sejalan dengan sifat kandungan hukum di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yakni ada yang ditampilkan secara jelas dan terperinci dan ada pula yang berbentuk aturan umum yang memerlukan penjabaran dan penjelasan lebih lanjut. Salah satu upaya para ulama untuk merumuskan aturan hak asasi manusia menurut syari'at Islam adalah mengolaborasi nilai dan aturan dasar yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan teori-teori yang sudah mapan. Dalam hal ini, teori *maqashid al-Syari'ah* yang sangat terkenal di dalam ilmu ushul fiqh dan filsafat hukum Islam sering dipakai untuk merumuskan dan menguraikan hak-hak asasi yang terkandung di dalam Syari'at Islam bermakna tujuan-tujuan *Syari'* (pembuat hukum) dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang dapat ditelusuri dari ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulaullah sebagai alasan logis bagi perumusan suatu hukum, tujuan dari huku-hukum tersebut tiada lain adalah kemaslahatan.<sup>25</sup>

#### B. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Menurut Prof. Dr. Nurcholish Madjid seorang cendikiawan dan seorang pemikir Islam mengatakan bahwa HAM bukan suatu akhir yang datang begitu tiba-tiba dan tanpa perjuangan. Meski suatu yang inheren dalam diri manusia, nilai-nilai HAM tumbuh melalui proses panjang dengan pengorbanan, pikiran, darah dan nyawa. Karena seseorang akan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 29.

memahami betapa bernilainya kemanusiaan itu bila ia terlibat atau paling tidak memahami betapa beratnya perjuangan penegakkannya. Berdasarkan nilai-nilai yang dipahami al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Nurcholish Madjid menyebut dua belas karakter dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi batu pijak teologis dan mewarnai keseluruhan pandangannya tentang HAM. Bila seseorang memahami karakteristik itu ia akan memiliki kesadaran dan penghormatan kepada penegakkan nilai-nilai HAM, sebab pelanggaran dan pengabaian nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan itu dikarenakan oleh minim atau bahkan kosongnya wawasan mengenai HAM dalam diri seseorang.<sup>26</sup>

Dalam pemikiran Nurcholish Madjid HAM sangat berkaitan erat dengan penghayatan dan nilai pandangan hidup, kesadaran tentang hak-hak Ibrani. Dalam kitab suci ini ditemukan isyarat butir-butir penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu penghormatan terhadap nyawa manusia dan hartanya. Ajaran tentang Hak Asasi Manusia ini tersurat dalam ayat suci al-Qur'an Surah Al- Baqarah (2) ayat 93:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ  
وَأَسْمِعُوا<sup>ط</sup> قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ<sup>ج</sup> بِكُفْرِهِمْ  
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

*"Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit (thursina) di atasmu (seraya kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka menjawab: "Kami mendengar tetapi tidak mentaati". Dan telah*

<sup>26</sup> Mohammad Mohib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 82.

*diressapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada Taurat)". (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 93).<sup>27</sup>*

Nurcholish menyatakan bahwa inilah dokumen perjanjian dan bait suci antara Tuhan dan Bani Israil. Di dalam Ayat ini menjelaskan tentang larangan membunuh dan mencuri, larangan ini menyiratkan adanya pengakuan atas hak hidup dan pemilik hak atas harta. Sehingga hak-hak yang terdapat dalam diri manusia harus dilindungi dan junjung tinggi oleh setiap orang.<sup>28</sup>

### C. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) aspek luar biasa di indikasikan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menyertai kejahatan tersebut. Hal ini dapat terjadi terutama apabila dilakukan oleh mereka yang termasuk sebagai aparatur negara (*state agent*) yang memiliki kewenangan tertentu dari negara. Menurut Muladi pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai Nuansa khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. Dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan yang baik haruslah memuat beberapa asas salah satunya asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam peroses pembentukan peraturan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.14.

<sup>28</sup> Mohammad Mohib, Islah Bahraw, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid.....*, h. 86.



perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Dalam sumber hukum Islam tidak yaitu al-Qur'an dan Hadits tidak dikenal dengan pelanggaran berat HAM.<sup>30</sup> Namun jika merujuk pada pengertian pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, secara transparan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Kejahatan genosida yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan secara seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok, etnis, dan kelompok agama.<sup>31</sup> Sedangkan bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Jenis pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, secara mendasar selaras dengan konsep hukum Islam dalam

---

<sup>29</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*....., h. 31.

<sup>30</sup> Madjid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 88.

<sup>31</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

al-Qur'an yang juga melarang hal tersebut. Berikut beberapa pelanggaran HAM dalam Islam:<sup>32</sup>

1. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
2. Pembunuhan, melakukan pembunuhan apabila dilakukan secara sengaja tanpa mengindahkan aturan syari'at, sangat dilarang dalam Islam.
3. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT akan menistakan orang-orang atau kelompok tertentu yang melakukan pengusiran tersebut di dunia serta siksaan yang sangat pedih kelak dihari kiamat.
4. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum Internasional, bahkan Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berperang apabila pihak lain yang sengaja memerangi, sebagai upaya untuk mempertahankan diri.
5. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemandulan atau senterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dalam konsep hukum Islam pemerkosaan atau perbuatan persetubuhan antara lawan jenis disebut dengan penzinahan.<sup>33</sup>

#### D. Hak-Hak Warga Negara

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkam Huquq al-insani*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa deskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an seperti hak untuk hidup, hak kebebasan

<sup>32</sup> Ahmad Kosasih, M.A, *HAM Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 128.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 135.

beragama, hak memelihara kehormatan manusia, dan hak-hak lainnya yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isra (17) ayat 33).<sup>34</sup>*

Dalam kajian fiqh *siyasah syar'iyah* yang diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, hak-hak warga negara harus dilindungi dan perlindungan terhadap harta dan jiwa, Islam tidak menyangkal fitrah manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan interaksi antar sesama.

#### E. Hak-Hak Pemimpin

Pemimpin dalam bahasa arab disebut dengan *imam* atau sering merujuk pada khilafah, Al- Mawardi menyebutkan dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila dilihat dari sejarah, ada hak lain bagi *imam* yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada

<sup>34</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 285.

masa Abu Bakar diceritakan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya, maka akhirnya diberi gaji harta baitul mal tersebut. Hal ini telah membawa kaum muslimin pada waktu itu mengenal satu prinsip penggajian (memerikan gaji) kepada khalifah.<sup>35</sup>

Hak-hak *imam* ini sangat erat sekali dengan kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Anbiya (21) ayat 73:<sup>36</sup>

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”. (Q.S An-Anbiya (21) ayat 73).<sup>37</sup>

Dapat dipahami dari arti surah An-Anbiya ayat 73 kita harus menaati peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin kita sebagai utusan Allah SWT yang diberi wahyu untuk mendirikan kebaikan serta

<sup>35</sup> Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 60

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 61

<sup>37</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya....., h. 328.

memajukan rakyatnya. serta kita harus membantu apabila pemimpin kita kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya sebagai pemimpin untuk kemaslahatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

## **2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

### **A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat**

Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia undang-undang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu DPR disebut lembaga legislatif, yakni lembaga pembuat dan penyusun Undang-Undang. DPR ialah suatu lembaga tinggi negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.

Wakil-wakil rakyat duduk dalam DPR dipilih dalam suatu pemilihan umum, di Indonesia pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali. DPR atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, menjaga serta memajukan kepentingan rakyat. Selain itu DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Serta bersama-sama presiden, DPR juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tiap-tiap tahun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> C.T.S. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: BINA AKSARA, 1986), h. 475.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67 Menyatakan bahwa “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Kemudian pasal 68 menerangkan “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara garis besar dibagi menjadi tiga periode yaitu, Periode *Volksraad*, Periode Masa Penjajahan Kemerdekaan, Periode di bentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang singkat dengan KNIP.

Pada masa penjajahan Belanda dikenal adanya lembaga perwakilan rakyat yang pembentukannya tidak melalui pemilihan umum, akan tetapi berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari Ratu Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Lembaga perwakilan yang namanya *Volksraad* atau Dewan Perwakilan Rakyat tersebut bukanlah lembaga perwakilan rakyat seperti parlemen. Namun dapat dikatakan bahwa *Volksraad* ini adalah cikal bakal dari lembaga perwakilan rakyat negara Republik Indonesia yang dikenal sekarang ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Max Boboy, *DPR RI Dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 44.



Barulah pada awal abad 20 pemerintah kolonial semakin menyadari serta melihat timbulnya gerakan kebangkitan nasional menuju Indonesia merdeka. Untuk menampung dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar seluruh dunia dengan selesainya perang dunia I (1914-1918), perintah kolonial Belanda membentuk semacam lembaga demokrasi yang disebut *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1918. Hingga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan di Indonesia, pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan *Volksraad* tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, DPR belum sempat dibentuk menurut aturan yang ditetapkan UUD 1945. Maka berlakulah ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

*“sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk, segala kekuasaannya oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.”*

Dikeluarkan maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945 (16 Oktober 1945) merupakan saat lahirnya DPR setelah Indonesia merdeka. Maklumat tersebut mengubah Status KNIP sebagai badan yang semata-mata membantu Presiden (Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 dan Keputusan PPKI Pada tanggal 18 Agustus 1945) menjadi badan yang menjalankan tugas-tugas legislatif dan membentuk GBHN. KNIP

berubah statusnya menjadi DPR sementara (DPRS) dan melakukan sebagian wewenang MPR (menetapkan GBHN).<sup>40</sup>

Demikianlah pada tanggal 29 Agustus 1945 peresmian yang dijadikan sebagai tanggal dan hari lahirnya DPR. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Salah satu tugas KNIP ialah membuat Undang-undang, Pelaksanaan pekerjaan KNIP sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP). Pada masa permulaan hidup bernegara, BP-KNIP inilah yang menjalankan tugas DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Kedudukannya adalah membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah.

#### B. Dasar Hukum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dasar hukum DPR sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUD 1945 juga membahas mengenai fungsi, tugas dan wewenang yang harus dijalankan. Secara umum fungsi DPR adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam hubungannya dengan tugas DPR, ada tiga fungsi utama DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Salah satu wewenang DPR yaitu membentuk peraturan undang-undang.

---

<sup>40</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), h. 9.

Tentu ada dasar hukum tertentu yang menjadi landasan DPR mulai dari pembentukan DPR hingga keanggotaan DPR.

Dasar hukum DPR juga mengatur mengenai hak dan kewajiban DPR, didalam UUD 1945 juga telah diterangkan mengenai dasar hukum DPR yaitu:

1. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Pasal 20 ayat 2 UUD1945 : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 : Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan.
4. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
5. Pasal 22D ayat 3 UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai, otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. hubungan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
6. Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
7. Pasal 24B ayat 3 UUD1945 : Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
9. Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

10. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945 : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>41</sup>

Sudah jelas bahwa dasar hukum mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945 yang memuat keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kertatanegaran Indonesia yang menjadi representatif masyarakat Indonesia.

Dasar hukum mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yaitu undang-undang yang mengatur lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun pada Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tersebut dicabut atau sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sejak putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keharusan pembenahan konsep dan mekanisme pembentukan undang-undang untuk mengatur kembali kewenangan DPD yang sebelumnya disejajarkan dengan fraksi, komisi atau gabungan komisi di internal DPR, berubah menjadi setara dengan kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kemudian Undang-undang mengenai MD3 diatur oleh Undang-Undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dimana undang-undang terbaru ini tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, yang lebih utama dibentuk untuk mengatur secepatnya susunan dan kedudukan DPR dalam rangka mengantisipasi hasil pemilihan presiden langsung (2014).<sup>42</sup> Mekanisme persetujuan DPR atas Undang-Undang MD3 baru terkesan terburu-buru tujuannya adalah untuk membuat ketentuan yang tidak memungkinkan partai pemenang pemilu secara otomatis dapat menjadi pimpinan DPR, seperti sebelumnya.

Pada Tahun 2017 akhir terjadi lagi perubahan mengenai pengaturan tentang Undang-Undang MD3 yaitu dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dirubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD. Di dalam undang-undang terbaru ini banyak kotroversi yang terjadi dikalangan pejabat petinggi negara dan juga keresahan pada masyarakat, yaitu dengan adanya penambahan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan atau yang biasa disebut dengan MKD dalam Pasal 122 pada point 1 yang berbunyi bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum bagi kelompok, perseorangan, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan lembaga DPR maupun anggotanya, tentu saja hal ini banyak

---

<sup>42</sup> Enny Nurbaningsih, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1 (Februari 2015), h. 8.

menimbulkan opini masyarakat bahwa DPR anti akan kritik dari masyarakat yang seharusnya lembaga DPR adalah wadah masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah dan kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mengingat DPR adalah wakil rakyat yang dipercayai dan dipilih langsung oleh masyarakat.

### C. Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

#### 1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Secara umum dipahami oleh masyarakat fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Diantara tiga fungsi itu biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan undang-undang. Dalam berbagai konstitusi negara-negara berdaulat diadakan perumusan mengenai tugas pembuatan undang-undang (legislasi) dan tugas pelaksanaan undang-undang tersebut itu (eksekutif) kedalam dua kelompok kelembagaan yang menjalankan peranan yang berbeda.

Meskipun demikian apabila ditelaah secara mendalam, sesungguhnya tidak satu pun teks konstitusi maupun praktik dimana pun yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara kaku. Baik dalam urusan formal apalagi dalam kenyataan praktik, fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif selalu tumpang tindih. Setelah terjadi perubahan beban tugas dan tanggungjawab DPR menjadi tambah berat, akan tetapi itulah yang seharusnya dilakukan



karena salah satu fungsi DPR adalah menjalankan fungsi legislasi, disamping fungsi pengawasan dan anggaran.<sup>43</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan rakyat memiliki 3 pokok fungsi utama yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

a. Fungsi legislasi

Menurut teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak dibidang perundang undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu, untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk mengambil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Mayoritas Undang-Undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya .

b. Fungsi pengawasan

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif dibidang legislatif maka perannya dibidang pengawasan bertambah menonjol, badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pengawasan dilakukan melalui sidang penitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak pengawasan yang khusus seperti hak bertanya, iterpelasi, dan sebagainya

---

<sup>43</sup> Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 175-177.

### c. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran badan legislatif membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.<sup>44</sup>

### 2. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Pemahaman mengenai fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPR sebagai lembaga tinggi negara Indonesia mutlak diperlukan tidak saja demi kelancaran menjalankan jabatan baik sebagai lembaga maupun anggota DPR, tetapi juga penting dalam memposisikan diri sehingga paham batasan-batasan yang termasuk dalam lingkup jabatannya.

Adapun wewenang DPR yang sudah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden maupun DPR.

---

<sup>44</sup> Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 323.

- d. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- e. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- g. Memberikan persetujuan kepada presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tentu yang menimbulkan akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- i. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- j. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- l. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.
- m. Memberikan persetujuan calon hakim anggota agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
- n. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden<sup>45</sup>

Dalam melaksanakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPR berhak mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya dan meminta pejabat negara, pejabat pemerintah,

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.<sup>46</sup>

#### D. Hak-Hak Yang Melekat Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat disebut lembaga parlemen karena berasal dari kata *parle* yang berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintahan yang berkuasa, oleh karena itu DPR dibentuk dipusat untuk mengkritisi pemerintah pusat, dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten sesuai dengan tingkatannya. Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya DPR diberi berbagai hak dan kewajiban oleh UUD 1945 yaitu:

1. Hak Petisi (yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)
2. Hak Budget (yaitu hak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah).
3. Hak Interpretasi (yaitu hak untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif).
4. Hak Amandemen (yaitu hak untuk mengadakan perubahan peraturan perundang-undangan).
5. Hak Angket (hak untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus).
6. Hak Inisiatif (hak untuk mengajukan rancangan undang-undang).
7. Hak Prakarsa (hak untuk mengajukan pernyataan pendapat) Sedangkan kewajiban DPR dalam UUD 1945 yaitu:
  - a. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
  - b. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
  - c. Memperhatikan aspirasi rakyat<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008), h. 79.

<sup>47</sup> Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 43-44.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa hak-hak yang melakat pada lembaga DPR sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan Indonesia DPR maupun anggotanya harus menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya agar terciptanya negara yang demokratis yang sesuai dengan kedaulatan rakyat dimana memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia.

Dalam demokrasi konstitusional di Indonesia dimana gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang batas kekuasaan dan hak-haknya dibatasi dan tidak dibenerkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Oleh karena itu disebut dengan pemerintah berdasarkan konstitusi. Pembatasan kekuasaan pemerintah dijalankan oleh manusia, sedangkan manusia banyak kelemahan. Seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalangukan kekuasaan dan kewenangan tersebut dan manusia dengan kekuasaan yang tak terbatas pasti akan menyalanggunakan. Oleh karena itu pada saat demokrasi konstitusi yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara.<sup>48</sup>

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa negara yang maju haruslah berlandaskan atas kepentingan rakyat, dan berprinsip pada nilai-nilai pancasila dan prinsip demokrasi sehingga antara yang diperintah dan yang memerintah seimbang agar tidak terjadinya penyimpangan politik dan hukum di kalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Negara yang

---

<sup>48</sup> Philipus. Ng dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*....., h. 118.

demokratis pula harus terbuka dan transparan dalam membuat suatu kebijakan agar tidak terjadinya salah penafsiran di kalangan masyarakat yang dapat menimbulkan sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

E. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang MD3 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ditegaskan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus puluh orang, keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden, masa jabatan Anggota DPR adalah lima ratus dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai warga negara yang mempunyai fungsi, hak, tugas, dan wewenang. DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga negara untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.



Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR tersebut. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga negara yang melanggar permintaan DPR tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Dalam panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat disandera habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan hukum.<sup>49</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, serta wewenang yang berkenaan dengan hal-hal tertentu seperti perubahan UUD. Sehingga kedudukan MPR, DPR dan DPD sederajat dengan Presiden dan wakil presiden.

## **B. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tutut Apridayanti yang berjudul " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)" Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI menyimpulkan Kewenangan MKD dalam memberhentikan ketua DPR RI harus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara MKD.

---

<sup>49</sup> Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Depok: IJABA Press, 2016), h. 135-136.

Penelitian yang dilakukan Tutut Apridayanti fokus pada Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di pandang dari Fiqh Siyasah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 yang mengembalikan hak rakyat dalam mengkritik atau mengeluarkan pendapat setelah MKD tidak dapat lagi menindak lanjuti apabila ada masyarakat yang mengkritik atau mengeluarkan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh DPR di pandang dari Fiqh Siyasah.<sup>50</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riwando Manihuruk dengan judul “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)” menyimpulkan bahwa Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR harus mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum yang membuat hak imunitas bagi anggota DPR tanpa batas.

Penelitian yang dilakukan oleh Riwando Manihuruk fokus pada Hak Imunitas Anggota DPR yang terbebas dari aturan hukum di pandang dari hukum positif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 pasca Putusan Mahkamah

---

<sup>50</sup> Tutut Apridayanti, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI, (*Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018*).

Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di pandang dari Fiqh Siyasah.<sup>51</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jordi Auliansi Simanjuntak dengan judul “Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Demokrasi di Indonesia” menyimpulkan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR bertujuan untuk menegakkan kode etik anggota DPR maka MKD dibentuk untuk menjaga setiap anggota DPR agar tidak keluar dari tugas dan fungsi serta memantapkan anggota DPR dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jordi Auliansi Simanjuntak fokus pada Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada pada Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di pandang dari Fiqh Siyasah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Riwando Manihuruk, Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018), (*Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sumatera Utara, 2018*).

<sup>52</sup> Jordi Auliansi Simanjunta, Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Demokrasi di Indonesia, (*Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jember, 2018*).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Saraswati, Esmi Warassih Pujirahayu dan Yohanes Nafta Irawan dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan” menyimpulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK membatalkan Pasal 122 huruf l karena dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir dan menimbulkan rasa takut ditengah masyarakat. Pasal ini juga menggeser peran MKD menjadi lembaga etik yang mencakup pihak eksternal .

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Saraswati, Esmi Warassih Pujirahayu dan Yohanes Nafta Irawan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang mencakup norma dan hukum yang multitafsir serta peran MKD yang mencakup menjadi pihak eksternal, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada pada pada Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di pandang dari Fiqh Siyasah.<sup>53</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Susan Elseline Widjaja yang berjudul “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ” menyimpulkan perubahan Undang-Undang Nomor

---

<sup>53</sup> Retno Saraswati, Esmi Warassih Pujirahayu, Yohanes Nafta Irawan, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* vol. 48 No.1 (Januari 2019), h. 78.

17 Tahun 2014 dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang isinya mengatur tentang kekebalan hukum yang dibuat oleh DPR sendiri untuk memperkuat kedudukan mereka di pemerintahan serta memperluas kewenangannya dan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 harus dikawal oleh semua pihak supaya dalam implementasinya tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh fokus pada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang dapat menimbulkan perluasan kewenangan DPR, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada pada Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di pandang dari Fiqh Siyasah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Susan Elseline Widjaja, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, (*Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Surabaya, 2018*).

### **BAB III**

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

### **A. Gambaran Umum Mengenai Mahkamah Kostitusi**

Reformasi yang meghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 telah membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem yang diadopsi sesungguhnya merupakan sesuatu yang angat baru bagi Indonesia dalam arti lahirnya pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional menggantikan bentuk yang vertikal hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada dipuncak kekuasaan. Dengan pergeseran ke arah penyusunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional tersebut maka kedudukan lembaga negara menjadi setara, yang masing-masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Perubahan ini bertujuan antara lain untuk menyempurnaan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Kedaulatan rakyat yang berada ditangan rakyat tadinya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat, dengan perubahan ketiga kedaulatan rakyat tersebut kemudian dilaksanakan menurut UUD.<sup>55</sup>

Perubahan UUD 1945 melahirkan gambaran baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Kostitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>56</sup>

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi, bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia masih relatif baru. Oleh karena itu ketika UUD 1945 dirumuskan gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika merumuskan UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materil kedalam kekuasaan kehakiman. Namun dikalangan demokrasi mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20 ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer, sehingga setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Maruarar Siahan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 no 3, (Juli 2009), h. 356.

<sup>56</sup> Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia.....*, h. 212.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 215.



Sejak dibentuknya pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga awal juli 2011 Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan perkara 840 permohonan dengan rincian 372 permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 15 permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, 116 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tingkat nasional, dan 337 permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah. Adnan dari seluruh perkara yang diperiksa dari Mahkamah Konstitusi, 781 permohonan telah diputus sampai dengan awal juli 2011.<sup>58</sup>

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban untuk memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang. Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 219.

dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal ini membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi, konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.<sup>59</sup>

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling control saling imbang dalam praktik penyelenggaraan negara. keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.<sup>60</sup>

Sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum, sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah merespon harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Terkait dengan prinsip keadilan ini Mahkamah Konstitusi mengedepankan kedailan substatif yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materil daripada kebenaran formal-prosedural. Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya keadilan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 212-216.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 217.

substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan pada masa lalu. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk menggairahkan penegakan hukum dalam masyarakat, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi sudah membuktikan sebagai institusi hukum yang dapat dipercaya dan terhormat (*reliable and honoured court*) di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi percepatan reformasi hukum di Indonesia.<sup>61</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menjalankan kewenangannya termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran Konstitusi sehingga disebut juga *the sole interpreter of the constitution*. Sebagai penafsir tunggal konstitusi, banyak hal yang menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif dimana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 218.

negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan komperntesi objek perkara ketatanegaraan.<sup>62</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakan hukum dan keadilan, dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban. Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance* serta terpicu dengan buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru yang ditandai dengan maraknya kolusi, korupsi dan nepotisme, markus (makelar kasus), dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum serta hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar.

Teori-Teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan *judicial review* yang terjadi di beberapa negara di dunia, perkembangan *judicial review* yang paling berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah

---

<sup>62</sup> Nanang Sri Damardi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 26 no 2, (Agustus 2011), h. 677.

pada saat pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus *Mabury versus Madison*.<sup>63</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi agar tersedianya jalan hukum untuk mencapai kepastian hukum, mengatasi perkara-perkara yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan dan akutanbel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang terjadi diselesaikan secara hukum pula.<sup>64</sup>

#### **B. Proses *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3**

Di Indonesia gagasan tentang *judicial review* untuk untuk menjamin konsistensi isi Undang-Undang terhadap UUD dan konstitusi telah lama muncul, bahkan pernah dimuat di dalam konstitusi RIS dan UUD 1950, didalam UUD 1945 yang asli (sebelum diamandemen) ketentuan tentang *judicial review* tidak dimuat sama sekali. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat diimplementasikan dalam praktik, barulah setelah diamandemen pada amandemen ketiga UUD 1945 Tahun 2001 yang memuat

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 678.

<sup>64</sup> Khairuddin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 3

ketentuan tentang *judicial review* yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat Undang-Undang terhadap UUD 1945.<sup>65</sup>

Dalam konteks kehendak tinggi untuk menjunjung tinggi supermasi hukum dengan pengadilan sebagai pilar terpenting, Salah satu keberhasilan bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga Tahun 2001 adalah terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh kedua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebelum perubahan UUD NRI 1945 kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh MA namun kini kehadiran Mahkamah Konstitusi telah melengkapi fungsi peradilan khususnya terkait dengan Penyelesaian Masalah-masalah ketatanegaraan. Salah satu point mendasar dari penataan kekuasaan kehakiman pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 adalah masalah pengaturan kewenangan *judicial review* atau hak menguji yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan terkait dengan kewenangan pengujian konstitusional Undang-Undang (*the constitutionality of law*) terhadap UUD 1945 menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>65</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi.....*, h.128.

Dalam perspektif teori konstitusi dianutnya sistem *judicial review* adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *grundnorm* dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>66</sup>

Dasar ide akan adanya Proses *judicial review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan dalam rangka penyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan *judicial review* di Indonesia.<sup>67</sup>

Kewenangan *judicial review* yang melekat pada Mahkamah Konstitusi merupakan hak untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945, jika suatu undang-undang

---

<sup>66</sup> Abdul Latief, *Buku Ajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 9.

<sup>67</sup> Janpatar Simamora, Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 25 No. 3, (Oktober 2013), h. 389.



atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjelaskan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor Konstitusi.<sup>68</sup>

Proses *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3, setelah dilaporkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Yudhistira Rifki Darmawan. Para pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Maret 2018 Pasal 122, kemudian di lakukan *judicial review* yaitu menguji Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Karena Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan menambah kekebalan hukum terhadap DPR, proses *judicial review* yang dilakukan untuk mengetahui isi dari Pasal tersebut apakah isi dalam Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dan demokrasi Indonesia serta apakah Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaporkan oleh pihak yang menentang isi dari Pasal tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat yang membatasi masyarakat untuk mengkritik anggota DPR dan lembaga DPR.

---

<sup>68</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta, 2009), h. 12.

Setelah Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tersebut dilakukan *judicial review* terhadap UUD 1945, dan hakim telah mengetahui hasilnya maka hakim berhak mempertimbangkan laporan tersebut dan berhak membuat putusan untuk perkara mengenai isi dari Pasal tersebut dan berhak untuk membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 agar tidak berlaku kekutan hukum di dalam pemerintahan Indonesia.

### C. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. *Pertama* dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), *Kedua* dalam ketetapan MPR (TAP MPR), *Ketiga* dalam Undang-Undang, *Keempat* dalam peraturan pelaksanaan Perundang-Undangan. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Azyumardi Azra, M.A, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 221.

Setiap individu (warganegara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat *non derogable rights* (hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus dilindungi) maupun yang *derogable rights* (hak dalam keadaan normal harus dilindungi, hak-hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh negara. Oleh karenanya bila negara tidak mampu melindungi HAM warga negaranya negara yang bersangkutan dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi rakyatnya.<sup>70</sup>

Dalam UUD 1945 amandemen I-IV UUD 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak :

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
2. Hak kedudukan yang sama didalam hukum.
3. Hak kebebasan berkumpul.
4. Hak kebebasan beragama.
5. Hak penghidupan yang layak.
6. Hak kebebasan berserikat.
7. Hak memperoleh pengajara atau pendidikan<sup>71</sup>

Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan, dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah, ajaran manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at atau fikih. Dalam

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 231.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 216.

konteks syari'at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM), adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menepatkan manusia makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap manusia tanpa terkecuali.<sup>72</sup>

Dalam bahasa arab HAM adalah *al-huquq al-insaniyyah* akar kata *Haqq* (jamak *Huquq*), *Haqq* memiliki beberapa arti milik, ketetapan dan kepastian serta mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal (8) ayat 8:



لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun oraang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”. (Q.S Al-Anfal (8) ayat 8).<sup>73</sup>

Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. *Fuqaha* memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'iy* atas suatu kekhususan yang terlindungi, dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 218.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 117.

<sup>74</sup> Siti Aminah, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Presfeltif Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8 No 2, (Juli 2010), h. 162.

Dalam prinsip demokrasi HAM sangat dijunjung tinggi oleh negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi terpenting yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan ialah setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya, keluarganya bahkan masa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkereasi bahkan melakukan unjuk rasa. Akan tetapi kebebasan disini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau menghancurkan alat perlengkapan negara.<sup>75</sup>

Namun baru-baru ini salah satu lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat melakukan sebuah Pelanggaran HAM dengan dibuatnya Undang-Undang yang menurut warga negara dapat merugikan dan membatasi hak-hak yang melekat pada warga negara salah satunya hak untuk mengeluarkan pendapat. Terjadinya pengesahan Undang-Undang tersebut nyatanya tidak mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat maupun para ahli, salah satu pasal dalam Undang-Undang MD3 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia adalah Pasal 122 huruf l yang isinya:

---

<sup>75</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), h. 178.

*"Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".*

Dalam Pasal ini adanya penyimpangan politik dan hukum serta pembatasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi masyarakat. Sehingga undang-undang tersebut dalam penerapannya mengalami berbagai macam interpretasi dan multitafsir di kalangan masyarakat dan para pengamat hukum karena pasal tersebut dianggap memberikan kekebalan terhadap hukum (imunitas) bagi anggota DPR.

Dalam pelaksanaannya kebebasan berbicara diparlemen ini pada prinsipnya tidak ada batasan artinya bahwa anggota DPR bebas untuk berbicara diparlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, kebebasan bicara anggota DPR juga berlaku untuk proses atau perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar sehingga pernyataan yang dikeluarkan dapat berimplikasi pelanggaran, hak imunitas anggota DPR berupa kebebasan berbicara itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.

Dalam negara demokrasi warga negara dijamin kebebasan berbicara dan mengeluarkan pikiran serta pendapat mereka mengenai kinerja pemerintahan tetapi warga negara juga diberikan beban tanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan terhadap hak kebebasan tersebut, jadi kebebasan berbicara atau mengeluarkan pikiran, pendapat tidak sepenuhnya bersifat absolut melainkan ada batasan-batasannya, tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya tidak boleh berlebihan.

Hak imunitas bagi seorang DPR telah tercantum dalam Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal. *Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengeluarkan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal yang lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam Undang-Undang.<sup>76</sup>

Dengan demikian hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. bagaimana apabila jadinya jika dalam hal warga negara mengemukakan pendapat, mengkritik, dalam menjalankan fungsi DPR sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karenanya nantinya akan dituntut dijalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat.<sup>77</sup>

Karena ketidak sesuaian Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dengan konsep demokrasi Indonesia dan melanggar hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta menambah kekebalan hukum (imunitas) bagi DPR, maka beberapa pihak mengajukan gugatan mengenai Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>77</sup> Muhammad Muniri, Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI Menurut UU No.17 Tahun 2014, *Jurnal Yustitia* Vol.18 No. 1 (Mei 2017), h. 4.



yaitu: Dr. Husdi Herman, S.H., M.H (Dosen), Yudhistira Rifky Darmawan (Mahasiswa) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materil Undang-Undang MD3 tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu perselisihan sengketa kewenangan lembaga negara atau uji materil Undang-Undang yang telah diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh penyelesaian dengan beberapa cara, penyelesaian itu dapat terjadi bersifat sementara atau bersifat permanen, dengan satu putusan yang bersifat final dan mengikat dengan dicapainya satu putusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi, satu penyelesaian yang bersifat sementara, terjadi misalnya kerana sebelum persidangan dimulai atau selama proses persidangan berlangsung tetapi belum mencapai keputusan, pemohon menarik permohonannya.<sup>78</sup>

Dalam hal penarikan sebelum persidangan dilakukan maka ketua Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan ketetapan tentang penarikan tersebut, sedang apabila penarikan permohonan dilakukan pada saat proses berjalan maka setelah mendengar pendapat pemohon maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan tersebut, dan mencatat penarikan permohonan tersebut dalam buku register perkara. Dapat terjadi setelah penarikan permohonan, termohon tidak menyetujui dan meminta sengketa diakhiri dengan satu putusan yang akan dijadikan pedoman

---

<sup>78</sup> Khairuddin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 109.

dalam melaksanakan kewenangan tersebut secara tegas dan jelas. Dalam hal penarikan dikabulkan maka timbul suatu akibat hukum bahwa permohonan yang sama yang menyangkut sengketa kewenangan tersebut tidak dapat lagi diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi untuk diputus. Dalam keadaan tertentu penting tanpa sebagai pengecualian, permohonan kemudian dapat diajukan kembali karena alasan (1) substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional (2) tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa (3) adanya kepentingan hukum yang memerlukan kepastian hukum. Ketiga alasan ini sebagai dasar untuk memperbolehkan permohonan yang sudah ditarik dapat diajukan kembali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur ini didasarkan pada delegasi wewenang yang ditetapkan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini”.*

Dalam penjelasan Pasal 86 tersebut bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan undang-undang Mahkamah Konstitusi.<sup>79</sup> Lembaga Negara (DPR) yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara bukan membuat kebijakan peraturan undang-undang dengan membuat kewenangan yang menyimpang dari prinsip demokrasi negara Indonesia.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 110.

Dalam perspektif fiqh siyasah menyelesaikan suatu perkara harus dilandasi dengan prinsip keadilan, ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an memerlukan banyak penjelasan melalui ijtihad ulama agar dapat dijalankan umat dalam masyarakat. karena ijtihad ulama ini merupakan ajaran dalam Islam, ajaran Islam itu dalam sejarah pada hakikatnya senantiasa bertambah dan berkembang sehingga pada akhirnya yang banyak terdapat dalam Islam adalah ajaran hasil ijtihad ulama yang tidak bersifat mutlak benar, tetapi relatif berubah dan dapat dirubah.<sup>80</sup>

Prinsip keadilan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat, Islam dijadikan acuan bagi sistem asas keadilan. al-Qur'an sebagai sumber utama tidak menjelaskan secara rinci tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaidah *kulli* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ءَوِ  
ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا لِلّٰهِ فَٱلْأَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ  
ءَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْاْ أَوْ تَعْرَضُواْ فَإِنَّ لِلّٰهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar*

<sup>80</sup> Iskandar Usman, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011), h. 143.

*balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S An-Nisa (4) ayat 135).*<sup>81</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut pemerintah dituntut untuk menjamin keamanan masyarakat dan yang paling penting adalah menegakkan keadilan, agar terciptanya negara yang tentaram dan damai sehingga tidak adanya perpecahan di kalangan masyarakat dan mengurangi tindakan kekerasan terhadap sesama manusia dimuka bumi, melaksanakan ketetapan syara serta undang-undang yang sah menurut kehendak zaman, keadaan masa dan tempat.

Dalam ruang lingkup Fiqih Siyasah peraturan mengenai hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara dan negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara diatur dalam fiqh siyasah *dusturiyah*.<sup>82</sup> Fiqh Siyasah *dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks meliputi hal-hal sebagai berikut:

Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan *imamah* (hak dan kewajibannya), persoalan rakyat (status dan hak-haknya), persoalan *bai'at*, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqdi*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya. Dilihat dari keseluruhan persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu persoalan rakyat dan persoalan *ahlul halli wal aqdi* (perwakilan rakyat). Fiqh Siyaah *dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h.100.

<sup>82</sup> Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah....., h. 31.

dituntut oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>83</sup>

Sehingga dalam penyelesaian suatu perkara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan menjamin atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap masyarakat agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga sehingga tidak terjadinya lagi perbuatan kesewenang-wenangan lembaga negara dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dapat membatasi hak-hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat atau mengkritik wakil rakyat dan pemerintah. Dapat dipahami dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah berprinsip pada prinsip keadilan agar terhindar dari kemungkaran, serta sesuai dengan apa yang kita ketahui mengenai perkara tersebut tanpa melebih-lebihkan perkara tersebut, dalam menyelesaikan perkara juga harus melihat hak-hak yang melekat pada manusia agar tidak menyimpang dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

#### **D. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI2018**

##### **1. Pokok-Pokok Permasalahan**

Pemohonan Perkara Pengujian Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diajukan oleh

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 46.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Yudhistira Rifki Darmawan. Para pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Maret 2018. Dalam Pasal 122 huruf 1 berisi mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bahwa dalam dalil para pemohon menyatakan bahwa DPR dibentuk untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan bukan berhadap-hadapan dengan rakyat, selanjutnya dalam Pasal 122 huruf 1, berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara tertulis maupun lisan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945

Hal juga yang menjadi pokok permohonan dari pemohon adalah dimana dalam Pasal 122 huruf 1 tersebut bertentangan dengan demokrasi Indonesia yaitu dimana Pasal tersebut membatasi rakyat untuk mengeluarkan pendapat mereka, dimana DPR seharusnya tidak membuat Pasal 122 huruf 1 tersebut mengingat DPR telah mempunyai hak-hak imunitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Oleh karena terdapat kata Merendahkan Kehormatan dalam Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 dapat menjadi kata multitafsir dikalangan pengamat hukum dan masyarakat, dimana DPR enggan untuk dikritik sehingga bertentangan dengan nilai demokrasi dan prinsip pancasila.

## 2. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah berwenang menagadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berlakunya Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional dan hak asasi warga negara Pemohon I atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak sevara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

## 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa diantara isu konstitusional yang dikemukakan para Pemohon, hal



yang paling krusial yang dipermasalahkan adalah norma yang terdapat dalam Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 yang dimana dalam Pasal tersebut terdapat kata “merendahkan kehormatan” yang tidak jelas dalam konteks hak DPR, sehingga kata tersebut menjadi multitafsir dikalangan pengamat hukum dan masyarakat. Selain itu Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 tidak saja merugikan hak-hak rakyat tetapi juga menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga etik internal juga mencakup menjadi pihak eksternal.

Dalam hal ini Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana daiatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antar norma Undang-Undang MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 beralasan menurut hukum. Dalam Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan merugikan hak-hak warga

negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah dikemukakan, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Amar Putusan;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suharto Saldi Isra, I Dewa Gede Pulguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahidin Adam, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suharto Saldi Isra, I Dewa Gede Pulguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahidin Adam, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohin/kuasanya, Presiden atau tyang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitsi Nomor 16/PUU/XVI/2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3 Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.**

Putusan hakim merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh para pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*) melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, setelah dianggap cukup, hakim harus menentukan peraturan hukum yang akan diterapkan

Dalam ilmu Fiqih Siyasah Hakim yang disebut dengan istilah *Qadhi* yang mengurus peradilan, *Qadhi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. oleh karena itu Seorang Qodhi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qodhi*. Qodhi tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya atau tekanan dari siapapun ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun.

Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah, ia suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Hakim harus tetap berjalan sesuai dengan hukum *syar'iyah* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu jabatan hakim merupakan bagian tugas dari khalifah dan secara umum beradadi wilayahnya. Dalam pelaksanaanya tugas hakim dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama* hakim untuk memutuskan persengketaan antar umat manusia dan muamalat dan hukum-hukumnya, hakim-hakim untuk urusan ini dipilih dari kaum muslimin yang adil dan ahli *fiqh*. *Kedua* Hakim untuk memutuskan tindak pidana (*mukhalafah*) yang membahayakan hak jama'ah dan perlu diputuskan dan diselesaikan. *Ketiga* Hakim untuk mengajukan perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara atau salah

seorang pegawainya, dan untuk memutuskan teks-teks perundang-undangan dan legalitas materi undang-undang dasar serta konstitusi undang-undang dan legalitasnya, dalam urusan ini hakim haruslah adil, ahli *fiqh* dan *ijtihad* dalam memutuskan suatu perkara yang dinamakan hakim-hakim pengaduan (*qudhatul mazhalim*). Dalam menjalankan tugasnya putusan hakim haruslah Adil dan tidak memenangkan salah satu pihak dalam persengketaan, jika dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “ Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa” dengan demikian dalam menetapkan putusannya pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan, ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa pada saat itulah hatinya bergetar, ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah SAW. kepada seorang sahabatnya sebagai berikut:

*“Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat, dan puasa. Wahai Hurairah penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dari besar dari padangan Allah daripada melakukan maksiat enampuluh tahun”.*

Pesan ini wajib dipahami dan diamalkan oleh para hakim. Sehingga dalam putusan hakim haruslah bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah Adil dalam memutuskan suatu perkara tercantum juga dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) Ayat 58:

إِنَّ لِلَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ لِلَّهِ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ۖ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa (4) ayat 58).<sup>85</sup>*

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap hukum, bahkan tujuan yang terpenting. Putusan hakim dalam hal merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan putusan yang sangat adil dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dan lembaga negara, dimana dalam putusan hakim ini hak-hak rakyat dijamin kembali oleh tidak belakunya hukum perundang-undangan dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang betentangan denngan prinsip demokrasi Indonesia.

Dalam pertimbangannya hakim harus melihat dari beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, hakim harus menilai apakah Undang-Undang itu adil da nada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat

---

<sup>85</sup> Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 87.



memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan.

Petimbangan hakim dilihat dari aspek yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yaitu bahwasanya hakim harus mengetahui Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang membatasi hak masyarakat dalam mengeluarkan pendapat atau mengkritik DPR serta hakim juga harus menilai apakah Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 adil dalam pembuatannya dan bermanfaat bagi masyarakat serta ditegakkan untuk keadilan. Petimbangan hakim dilihat dari aspek filosofis yaitu dalam mengambil keputusannya hakim harus berdasarkan kebenaran dan keadilan tanpa adanya pengaruh dari luar yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam mengeluarkan putusan suatu perkara. Sedangkan dilihat dari aspek sosiologis pertimbangan hakim dalam mengambil putusan harus melihat dari kondisi masyarakat dan memperhatikan dampak psikologi masyarakat agar dalam mengeluarkan putusan tersebut tidak menjadi pertentangan dalam masyarakat. Terpenuhinya ketiga aspek tersebut maka keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan umum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3.**

Gagasan memberikan kewenangan kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review* tidak hanya muncul pada pembahasan UUD 1945 dalam rapat besar BPUPKI dan PPKI, usulan serupa juga muncul pada masa sidang Konstituante periode 20 Mei sampai 13 Juni 1957 pada sidang konstituante ini juga muncul usulan pembentukan pengadilan konstitusi di Indonesia. Secara umum dalam sidang konstitusi 1957 muncul usulan agar ada pasal dalam UUD yng menyatakan tidak berlakunya suatu undang-undang apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 konstitusi dibubarkan sebelum menyelesaikan tugasnya.

Untuk mengakhiri sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi, akan diselesaikan secara permanen dengan putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat secara umum. Putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan pengadilan pada umumnya didefinisikan

*“perbuaan hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa ng dihadapkan kepadanya.”*

Oleh karena sifatnya yang mengakhiri sengketa maka putusan disebut demikian juga sebagai *putusan akhir*. Disamping itu selama proses berjalan sebagaimana telah disinggung dimuka maka Mahkamah Konstitusi juga boleh mengambil putusan *sela* yang bersifat sementara yang memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan

kewenangan yang dipersengketakan yang berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Alasan pengambilan putusan sela tersebut ada dua macam yaitu:

1. Terdapat kepentingan yang mendesak yang apabila pokok permohonan dikabulkan akan menimbulkan akibat hukum yang lebih serius.
2. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap.

Putusan akhir yang dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, putusan tersebut dapat berbunyi:

1. Permohonan tidak dapat diterima.
2. Permohonan dikabulkan.
3. Permohonan ditolak.

Dalam hal permohonan dikabulkan maka dalam amar harus juga dinyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan untuk dipersengketakan dan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Jika putusan sela telah pernah dikeluarkan yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang dimaksud maka dalam putusan akhir harus juga ditegaskan status putusan sela tersebut. Jika putusan mengabulkan permohonan maka putusan sela tersebut dinyatakan sah sedang sebaliknya jika putusan akhir menolak permohonan maka putusan sela dinyatakan harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan dicabut. Hal ini berkaitan dengan segala

tindakan hukum yang diambil setelah putusan sela tersebut, untuk diketahui apakah perbuatan hukum demikian sah dan mengikat secara hukum berkenaan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut.

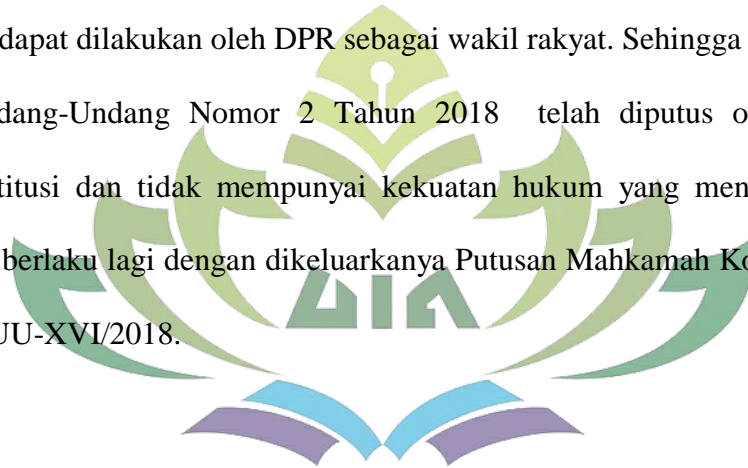
Untuk menentukan putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Rapat Permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak diperoleh kesepakatan umum maka akan dilakukan pengambilan putusan melalui suara terbanyak (*voting*). Namun apabila didalam *voting* tersebut tetap tidak diperbolehkan suara terbanyak, suara terakhir ketua rapat Pleno Hakim Konstitusi yang akan menentukan putusan yang akan dijatuhkan.

Dengan adanya Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut menciptakan keadaan dimana DPR dan anggotanya mendapatkan perlakuan berbeda dihadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya melanggar nilai-nilai demokrasi dan pancasila. Penetapan undang-undang tersebut merupakan wujud tidak adanya pengakuan DPR dan anggotanya terhadap hak warga negara Indonesia yang juga memiliki kedudukan yang

sama dengan anggota DPR di hadapan hukum, sehingga membuat masyarakat dan para ahli hukum mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk dicabut Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tersebut agar tidak menyimpang dari hak-hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang hak asasi manusia.

Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi harus berlaku adil karena didalam *fiqh siyasah* telah dijelaskan mengenai prinsip berlaku adil, *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri sehingga dalam melaksanakan sistem pemerintahan haruslah menjunjung nilai-nilai keadilan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Mengkritik penguasa dan menyampaikan pendapat termasuk diantara tuntunan keadilan, rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia dapat melaksanakan hukum-hukum syariat dan memperhatikan kemaslahatan mereka, penguasa tetap seperti individu rakyat lainnya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami dan untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak rakyat, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalihi syariat, serta rakyat mempunyai hak untuk mengkritik penguasa atau meminta pertanggung jawaban dari penguasa, bahkan rakyat mempunyai hak untuk memberhentikannya jika sudah mendesak.

Oleh karena itu dalil para pemohon yang berkaitan untuk menguji Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang merendahkan kehormatan DPR telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan melanggar hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat atau mengkritik anggota DPR yang seharusnya DPR dan anggotanya menerima pendapat, maupun kritikan oleh rakyat mengingat DPR merupakan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintah jika ruang antara rakyat dengan wakil rakyat mereka dibatasi maka akan adanya penyimpangan politik yang dapat dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Merendahkan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat**” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dalam pandangan Hak Asasi Manusia telah sesuai, putusan tersebut dirasa telah adil dalam hakim mengambil keputusan, karena dengan putusan tersebut peran MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) tidak lagi menyeleweng kedalam peran sebagai penegak hukum serta Pera Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menyimpang dari hukum yang di buat dalam membatasi hak-hak rakyat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 telah sesuai dengan fiqh siyasah, dimana dalam ruang lingkup fiqh siyasah peraturan mengenai undang-undang dibahas dalam siyasah *dusturiyah* yang menjamin hak konstitusional warga negara yaitu dengan mengembalikan hak untuk mengekspresikan pendapat, sehingga rakyat tidak takut akan bayang-bayang sebuah hukuman ketika akan mengeluarkan



pendapat serta aspirasinya, selain itu dengan dibatalkannya Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 masyarakat tidak mendapatkan lagi diskriminasi atau perbedaan dihadapan hukum ketika sedang berintraksi yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemimpin Negara terutama sebagai wakil Rakyat seharusnya tidak membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakat, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat selalu memprioritaskan rakyat dalam menerapkan hukum yang diberlakukan mengingat Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat .
2. Untuk para penerus bangsa terutama pemuda pemudi, yaitu jangan takut untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan karena negara kita adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia sehingga apabila ada aparat pemerintah, atau pun lembaga negara yang menyimpang dalam membuat aturan hukum harus diberantas agar tidak menyimpang dari nilai-nilai pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Latif, Abdul, *Buku Ajaran Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- M.A, Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Krisnayuda, Backy, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara 1986
- Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:2009
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Moosa, Ebrahim, *Islam Progresif*, Jakarta: Internasional Center For Islam and Pluralisme, 2004
- Kencana, Ibnu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Sutana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang & Departemen Agama RI, 2007
- Usman, Iskandar, *Istihsan Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011
- M. Gaffar, Jenedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: 2009

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Khairrudin dan Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012
- Fakhry, Madjid, *Etika Dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- El-Muhtaj, Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari Undanng-Undang 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: kencana, 2007
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisus (Anggota IKAPI), 2007
- Gunawan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008
- Boboy, Max, *DPR RI Dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Qodratilah, Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Mahfud MD, Mohammad, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Mohib, Mohammad dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Huda, Nimatul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara, 2012
- Ng, Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Marzuki, Suparman, *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014

AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Depok: IJABA Press, 2016

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Nurbaningsih, Enny, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No.1, Februari 2015

Simamora, Jantapar, Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 3, Oktober 2013

Siahan, Maruarar, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Hukum Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, Juli 2009

Muniri, Muhammad, Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR RI Menurut UU No.17 Tahun 2014, *Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1, Mei 2017

Damardi, Nanang Sri, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2, Agustus 2011

Aminah, Siti, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No. 2, Juli 2010

Saraswati, Retno, Esmi Warassih Pujirahayu, Yohanes Nafta Irawan, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* vol. 48 No.1 Januari 2019

Jordi Auliansi Simanjunta, Eksistensi Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Demokrasi di Indonesia, *Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jember*, 2018

Riwando Manihuruk, Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018), *Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sumatera Utara*, 2018.

Susan Elseline Widjaja, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, *Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Surabaya*, 2018.

Apridayanti, Tutut, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberhentikan Ketua DPR RI, *Skripsi : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

### **C. Undang-Undang**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/XVI/2018

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR. DPD. dan DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR. DPD. dan DPRD



